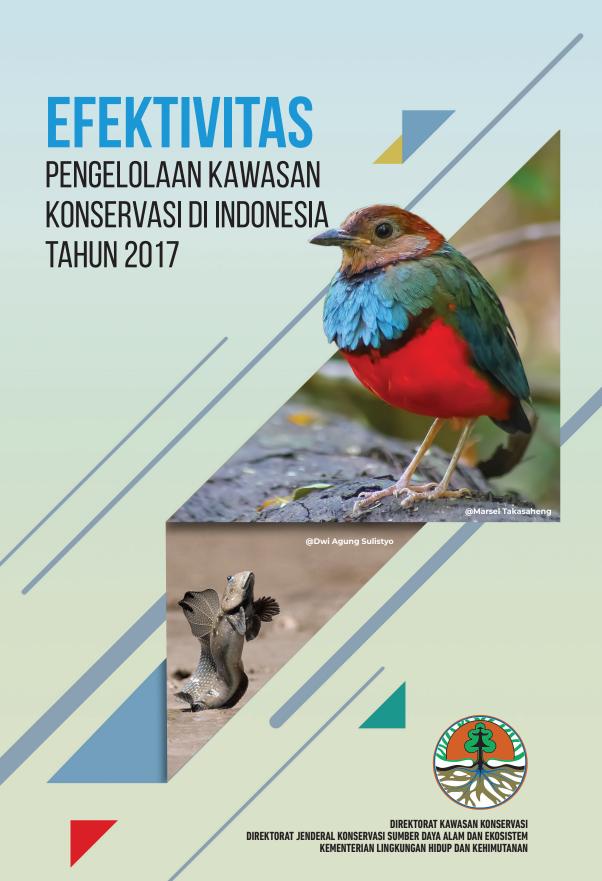


# **EFEKTIVITAS**

PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI DI INDONESIA TAHUN 2017







## Penyusun:

Andhika Chandra Ariyanto, Dewi Sulastriningsih, Dian Risdianto, Efin Muttaqin, Erwin Wilianto, Evi Indraswati, Muhamad Muslich, Munawar Kholis, Oktafa Rini Puspita, Rudijanta T. Nugraha, Wenda Yandra Komara, Yohanes Dwi Susilo (urutan sesuai abjad)

Foto Cover Depan: @Iskandar Foto Cover Belakang: @Analogius





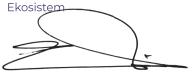
Perubahan yang cepat di hampir semua aspek kehidupan melahirkan tantangan vang cukup besar bagi pengelolaan kawasan konservasi. Dibutuhkan inovasiinovasi dalam strategi implementasi kelola agar pengelolaan kawasan konservasi menjadi lebih efektif. Pola pengelolaan lama yang tertutup, reaktif, soliter dan bersifat business as usual harus segera ditinggalkan, sehingga diharapkan akan lahir pengelolaan yang lebih cair, terbuka dan adaptif terhadap perubahan dan aspirasi para pihak.

Evaluasi terhadap pengelolaan menjadi salah satu kunci penerapan sistem pengelolaan yang adaptif. Melalui evaluasi pengelolaan kawasan konservasi diharapkan akan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, pelibatan parapihak, kerjasama dan berbagi pengetahuan yang akan bermanfaat bagi pengelolaan kawasan konservasi. Penilaian efektivitas merupakan evaluasi yang harus diintegrasikan ke dalam budaya dan proses manajemen untuk meningkatkan kinerja manajemen jangka panjang. Sehingga diharapkan menjadi bagian dari siklus bisnis inti (core business cycle) yang terkait dengan pelaporan, perencanaan, pemantauan, penelitian dan program kerja tahunan.

Salah satu Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Dava Alam dan Ekosistem adalah Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi yang dinilai melalui metode evaluasi dengan perangkat Management Effectiveness Tracking Tool (MEET). Penilaian efektivitas telah dilakukan selama kurun waktu 2015 dan 2017 telah menggambarkan banyak hal baik berupa fakta negatif yang memerlukan perbaikan maupun fakta positif yang dapat dijadikan pembelajaran (lesson learned) bagi pengelolaan kawasan konservasi lainnya.

Buku ini menggambarkan secara ringkas fakta-fakta tersebut, serta rekomendasirekomendasi yang dapat diimplementasikan bagi semua pihak untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. Semoga buku ini bermanfaat dan menjadi inspirasi pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia dan dunia secara global.

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan



WIRATNO





Selama hampir empat dekade pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia, secara formal belum pernah dilakukan evaluasi secara komprehensif dan mendalam terhadap pengelolaan kawasan konservasi. Sebelumnya, evaluasi pengelolaan dilakukan secara parsial dalam kerangka proyek tertentu. Kegiatan evaluasi yang dilakukan secara rutin oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga lebih banyak menyasar pada aspek penggunaan anggaran negara dan penyerapannya serta belum menyentuh elemen pengelolaan secara lengkap. Peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yang menjadi salah satu indikator kinerja Ditjen KSDAE diharapkan memberikan gambaran yang lebih luas mengenai status pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. Evaluasi pengelolaan merupakan salah satu isu penting dalam beberapa tahun terakhir. Penilaian efektivitas pengelolaan merupakan sebuah evaluasi yang dilakukan untuk melihat sejauh mana pengelolaan telah dilakukan dalam kerangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Dimana hasil evaluasi diharapkan dapat memberikan masukan mengenai perbaikan yang perlu dilakukan.

Penilaian efektivitas pengelolaan yang dilakukan dengan perangkat Management Effectiveness Tracking Tool (MEET) telah dilakukan sejak tahun 2015. Buku ini berisi analisis singkat pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia berdasarkan hasil penilaian METT tahun 2015 dan 2017. Tidak

seperti buku laporan pada umumnya, buku ini dibuat dengan konsep yang sederhana perpaduan antara deskripsi dan infografis, dengan harapan bisa lebih mudah dipahami oleh berbagai kalangan.

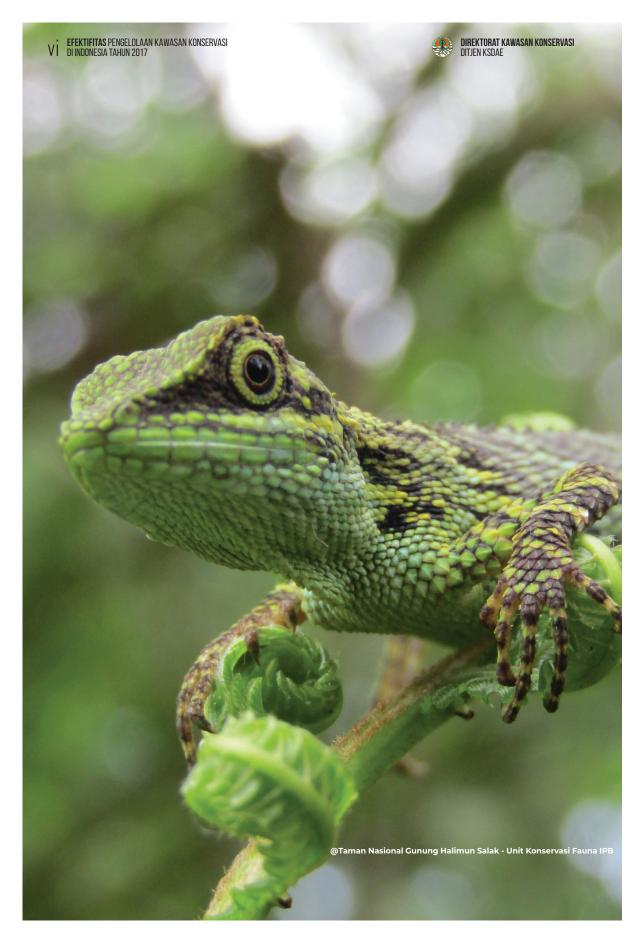
Kerjasama dan keterlibatan parapihak merupakan salah satu kunci keberhasilan peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, baik di tingkat tapak maupun di tingkat nasional. Penghargaan dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada parapihak yang ikut bekerja keras terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penilaian, implementasi peningkatan efektivitas maupun dalam pembuatan buku laporan ini, mulai dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai (Besar) Taman Nasional dan Balai (Besar) Konservasi Sumber Daya Alam, UPT Taman Hutan Raya, dan para mitra, yaitu WCS-IP, WWF, FFI, ZSL, Forum HarimauKita, Sintas Indonesia dan proyek kerjasama seperti UNDP Sumatran Tiger Project, E-PASS, USAID Lestari dan USAID Bijak. Semoga buku laporan ini dapat bermanfaat dan memberikan masukan bagi peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia.

Plt Direktur Kawasan Konservasi

Tandya Tjahjana



iii	KATA PENGANTAR	7 HASIL PENILAIAN & ANALISIS
iv	UCAPAN TERIMA KASIH	8 Ancaman terhadap Kawasan Konservasi
v	DAFTAR	11 Hasil Penilaian 2017
•	ISI	15 Hasil Penilaian 2015 & 2017
1	PENDAHULUAN	16 Kawasan Konservasi dengan Peningkatan Signifikan
•••••	•••••	17 Temuan Kunci
4	PENILAIAN	19 Dimensi Pengelolaan
	EVEKTIFITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI	23 PENUTUP
		24 REKOMENDASI &
	5 Elemen Penilaian MET	TINDAK LANJUT
	6 12 Kategori Ancaman	
	6 Proses Penilaian yang Dilakukan di Indonesia	25 Contoh Kegiatan yang Berdampak Penting pada Penilaian METT
	6 Tantangan dalam	Permalan METT
•••••	Melakukan Penilaian	
		29 DAFTAR PUSTAKA

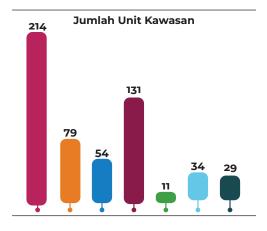


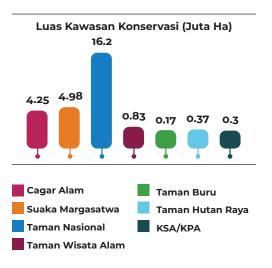


# **PENDAHULUAN**

Indonesia mempunyai 552 unit kawasan konservasi (KK) dengan luas ± 27 juta hektar yang mewakili seluruh tipe ekosistem di Indonesia. Meskipun pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia telah lama dilakukan yaitu sejak penunjukan kawasan konservasi oleh Direktorat Jenderal Kehutanan Departemen Pertanian tahun 1983, namun sampai dengan tahun 2015 belum dilakukan evaluasi pengelolaan kawasan konservasi secara menyeluruh.

Evaluasi pengelolaan KK yang ditujukan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas pengelolaan KK telah dilakukan. Penilaian efektivitas pengelolaan KK di Indonesia diinisiasi sejak tahun 2010 melalui metode Rapid Assessment and Prioritasion of Protected Area Methodology (RAPPAM) dan Management Effectiveness Tracking Tool (METT). Kemudian pada tahun 2015, Indonesia mengadopsi METT secara resmi sebagai kebijakan nasional dan menjadi salah satu indikator kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penilaian efektivitas adalah mengkaji seberapa baik atau sejauh mana pengelolaan yang dilakukan, terutama terhadap perlindungan nilai-nilai dan tujuan yang ditetapkan. Penilaian efektivitas bukan untuk menilai pengelola (manager).





# MANFAAT PENILAIAN EFEKTIVITAS: Memberi panduan penggunaan sumberdaya secara efektif

Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi

Meningkatkan kesadaran atas nilai kawasan konservasi

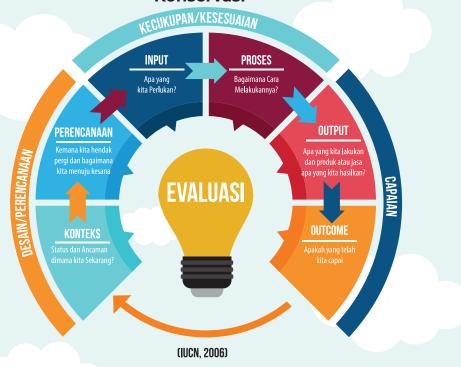
Menjadi alat bantu evaluasi dan perencanaan (prioritas pengelolaan sumber daya dan manajemen adaptif)

Melaksanakan Komitmen
Internasional dalam kerangka
Program Kerja Konvensi
Keanekaragaman Hayati (*Program*of Work Convention on Biological
Diversity)

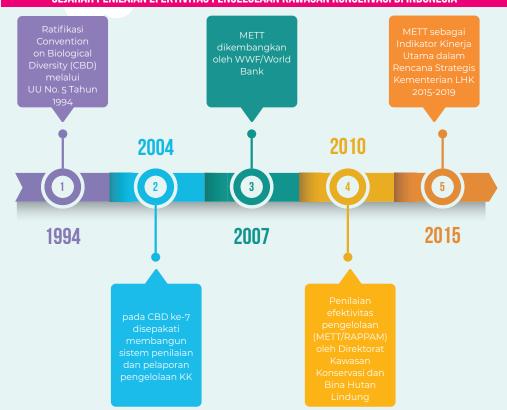
5



# Kerangka Kerja Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi



# SEJARAH PENILAIAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI DI INDONESIA





TARGET KONSFRVASI

≥70 %

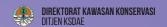
# LINIMASA PENGEMBANGAN EVALUASI PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI DI INDONESIA

- Permen LHK Nomor: P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang Renstra KLHK 2015-2019, Perdirien KSDAE Nomor: P.7/KSDAE-SET/2015 tentang Renstra KSDAE 2015-2019
- Perdirjen KSDAE Nomor: P.15/KSDAE-SET/2015 tentang pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan KK di Indonesia
- SK Dirjen KSDAE Nomor: SK.234/KSDAE-KK/2015 tentang Penetapan 307 unit KK (keterwakilan fungsi kawasan dan distribusi) sebagai lokasi target pencapaian
- Penilaian efektivitas pengelolaan KK di 283 KK
- Penetapan baseline, Surat Keputusan Dirjen KSDAE No.357/ KSDAE-SET/2015 tentang penetapan nilai awal efektivitas pengelolaan KSA dan KPA
- Training of Trainer (ToT) Fasilitator METT bersama Marc Hockings dan Fiona Leverington dari IUCN dan University of Queensland
  - Penetapan fasilitator nasional sebanyak 32 orang (Keputusan Direktur Kawasan Konservasi No. SK. 27/KK/PPKK.1/KSA.1/5/2016)
  - Penetapan baseline, Surat Keputusan Dirjen KSDAE No. 150/ KSDAE/SET/KSA.1/5/2016 tentang penetapan nilai awal efektivitas pengelolaan KSA dan KPA



- Penyegaran fasilitator nasional METT di Bogor
- Penetapan Kawasan Konservasi tambahan sebagai Prioritas Untuk Peningkatan Nilai Indeks Efektivitas Pegelolaan 70% melalui SK Dirjen KSDAE No. SK.203/KSDAE/SET/KSA.1/5/2017
- Bimbingan Teknis METT untuk mainstreaming kerangka evaluasi pengelolaan KK di Indonesia Timur di Makassar
- Perdirjen KSDAE No. P.12/KSDAE/SET/KUM.1/12/2017 tentang pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan KK, penggunaan METT tidak hanya dilakukan dalam kerangka pencapaian IKK tetapi bagian kegiatan rutin pengelolaan
- Penetapan nilai (midterm) METT pada 397 kawasan
  - Bimtek Faslitator UPT target di Batam
  - Submit hasil penilaain METT tahun 2015 ke WDPA IUCN melalui https://pame.protectedplanet.net/
    - Penilaian pada kawasan konservasi prioritas





# PENILAIAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI



# PROSES PENILAIAN

Focus Group Discussion (FGD) yang dipandu oleh fasilitator dan melibatkan parapihak (stakeholders)

### LEMBAR DATA I (INFORMASI KAWASAN)





# ELEMEN PENILAIAN METT



# **KONTEKS**

Status Hukum



# **PERENCANAAN**

- Peraturan Kawasan Konservasi
- Tujuan utama Kawasan Konservasi
- Desain Kawasan Konservasi
- Rencana Pengelolaan (RPJP)
- Perencanaan Penggunaan Lahan dan Air



# **INPUT**

- · Penegakan Peraturan
- · Inventarisasi Sumberdaya
- · Jumlah Pegawai
- Anggaran
- · Kepastian Anggaran
- · Perlengkapan



# **PROSES**

- Pengukuhan (demarkasi) Batas Kawasan Konservasi
- Sistem Perlindungan
- Riset
- · Penelitian Sumberdaya
- · Pelatihan Pegawai
- · Pengelolaan Anggaran
- Pemeliharaan Perlengkapan
- Pendidikan dan Penyadaran
- Pemerintah dan Swasta di Sekitar

- Masyarakat adat dan masyarakat asli/ tradisional
- Masyarakat Lokal
- Monitoring dan Evaluasi
- Operator Wisata Komersil
- Pungutan (PNBP atau Pungutan Lain)



# **OUTPUT**

- Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJPn)
- Fasilitas Pengunjung



# **OUTCOME**

- Keuntungan Ekonomis
- Kondisi Nilai Penting kawasan







# 12 Kategori Ancaman

- Pembangunan pemukiman dan komersial dalam kawasan
- 2. Budidaya pertanian dan perikanan di dalam kawasan konservasi
- Produksi energi dan pertambangan di dalam kawasan konservasi
- 4. Koridor transportasi dan jasa dalam kawasan konservasi
- Penggunaan dan ancaman sumberdaya biologis di dalam kawasan konservasi
- 6. Campur tangan atau gangguan manusia di dalam kawasan konservasi
- 7. Modifikasi sistem alam
- 8. Masalah spesies atau gen invasif dan bermasalah
- 9. Polusi yang masuk atau muncul di dalam kawasan konservasi
- 10. Peristiwa geologis
- 11. Perubahan iklim dan cuaca buruk
- 12 Ancaman budaya dan sosial spesifik



# PROSES PENILAIAN YANG DILAKUKAN DI INDONESIA

- Penilaian dilakukan oleh internal pengelola kawasan
- Penilaian dipandu oleh fasilitator namun tanpa melibatkan para pihak
- Penilaian beberapa kawasan konservasi dilakukan dalam satu workshop yang dipandu oleh fasilitator
- Penilaian dilakukan secara intensif di satu kawasan konservasi dengan melibatkan parapihak dan dipandu oleh fasilitator

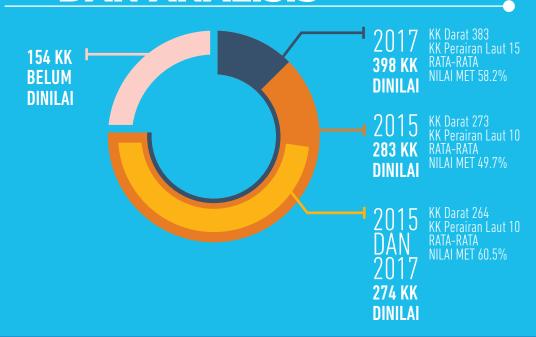


# TANTANGAN Dalam Melakukan Penilaian

- Penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dipahami hanya sebagai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
- 2. Unit pengelola kawasan tidak mengundang para pihak untuk ikut dalam proses penilaian
- Pihak yang menilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi tidak paham tentang kawasan yang dinilai
- 4. Unit pengelola berorientasi pada nilai, bukan pada proses perbaikan
- 5. Penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi tidak didukung dengan data yang lengkap
- 6. Pemahaman efektivitas pengelolaan kawasan konservasi (METT) di lingkup Ditjen KSDAE masih belum sama.

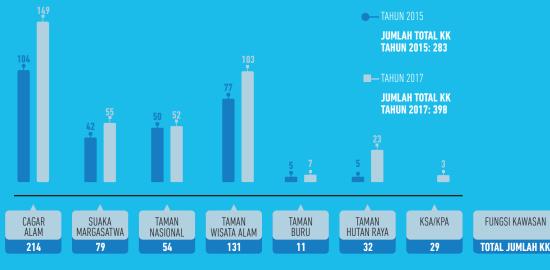






Dari total 552 unit Kawasan Konservasi, pada tahun 2015 telah dilakukan penilaian METT pada 283 kawasan, dengan nilai rata-rata METT 49.7%. Tahun 2017 dilakukan penilaian pada 398 unit Kawasan Konservasi dengan nilai rata-rata 58.2%. Dari data tersebut terdapat 274 unit Kawasan Konservasi yang dinilai di tahun 2015 dan dilakukan penilaian lagi di tahun 2017. Sementara itu terdapat 154 unit Kawasan Konservasi yang belum pernah sama sekali dilakukan yang menghasilkan nilai rata-rata nasional 60,5% penilaian.

# JUMLAH KAWASAN KONSERVASI YANG TELAH DILAKUKAN PENILAIAN





# **ANCAMAN TERHADAP**

# **KAWASAN KONSERVASI:**

Salah satu aspek yang dinilai di dalam METT adalah situasi ancaman didalam kawasan konservasi, dengan melakukan pendataan sistem scoring.
Dari 274 kawasan konservasi yang dilakukan penilaian pada Tahun 2015 dan 2017, terdapat 221 kawasan konservasi yang mempunyai data series ancaman, sehingga analisis ini menggunakan data dari sejumlah kawasan tersebut.

Pada dua tahun terakhir. upaya patroli dan pemantauan ancaman terhadap kawasan di lapangan semakin intensif dilakukan. Pelaksanaan patroli dan pemantauan ini mengungkap bahwa terdapat aktifitas di dalam kawasan konservasi baik legal maupun ilegal yang berpotensi mengganggu kawasan. Kategori ancaman yang terlihat nyata peningkatan skor diantaranya (1) penggunaan dan ancaman sumberdaya biologis, dan (2) Campur tangan atau gangguan manusia di dalam kawasan konservasi.

Dari 12 Kategori Ancaman tersebut dirinci dalam 52 Jenis Ancaman sebagaimana terdapat pada diagram di bawah ini:

# KATEGORI ANCAMAN DI KAWASAN KONSERVASI

	IAHUN 2015 IAHUN 2017	
1.	Pembangunan pemukiman dan	
	komersial di dalam kawasan konservas	i
		0.69
		0.57
2.	Budidaya pertanian dan perikanan di	
	dalam kawasan konservasi	• 0.41
		0.41
_	Produksi energi dan pertambangan di	0.50
3.	dalam kawasan konservasi	
		• 0.23
		0.21
4.	Koridor transportasi dan jasa dalam	
	kawasan konservasi	
		0.32
		0.35
5.	Penggunaan dan ancaman sumberdaya	
	biologis di dalam kawasan konservasi	
		0.94
		0.95
6.	Campur tangan atau gangguan manusia	1
	di dalam kawasan konservasi	
		0.61
		0.63
7.	Modifikasi sistem alam	
		• 0.65 • 0.60
8.		0.60
о.	Masalah spesies atau gen invasif dan bermasalah	
		• 0.25
		0.28
9.	Polusi yang masuk atau muncul di	
9.	dalam kawasan konservasi	
		0.61
		• 0.38
10.	Peristiwa geologis	
		0.42
		0.44
11.	Perubahan iklim dan cuaca buruk	
		0.65
		0.52
12.	Ancaman budaya dan sosial spesifik	
12.		• 0.30
		• 0.25

# JENIS ANCAMAN DI KAWASAN KONSERVASI





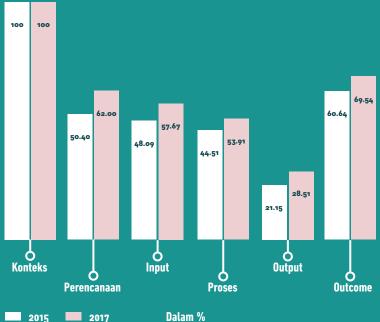


# HASIL PENILAIAN 2017

Hasil penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi Tahun 2017 menunjukan peningkatan antara 7 – 11%. Peningkatan terbesar pada elemen perencanaan 11,6 % dan yang terendah elemen output 7,36%. Peningkatan perencanaan kawasan ditunjukan dengan banyaknya Dokumen RPJP, Dokumen RPJPn, Dokumen Penataan Kawasan (blok dan zonasi) dan lain-lain.

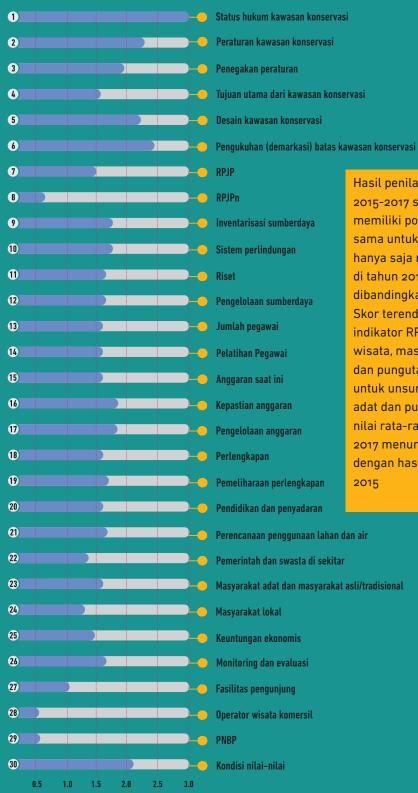
Isu pengelolaan yang perlu ditingkatkan dalam elemen output adalah lemahnya implemantasi rencana kelola (antara rencana dan implementasi kegiatan tidak sinkron) dan masih minimnya fasilitas pelayanan pengunjung wisata (sarpras) untuk kawasan yang dapat digunakan untuk kegiatan wisata alam.

# **HASIL PENILAIAN PER ELEMEN**





# **INDIKATOR PENILAIAN 2017**



Hasil penilaian di tahun 2015-2017 secara garis besar memiliki pola nilai yang sama untuk tiap indikator, hanya saja nilai rata-rata di tahun 2017 meningkat dibandingkan tahun 2015. Skor terendah ada pada indikator RPJPn, operator wisata, masyarakat adat, dan pungutan PNBP. Bahkan untuk unsur masyarakat adat dan pungutan PNBP, nilai rata-ratanya pada tahun 2017 menurun dibandingkan dengan hasil penilaian tahun 2015

Tahun 2015

Jumlah Total KK yang di Nilai 398

# RATA-RATA NILAI PER FUNGSI KAWASAN







# KATEGORI EFEKTIVITAS KAWASAN KONSERVASI (PADA 274 KAWASAN KONSERVASI YANG DINILAI DI TAHUN 2015 DAN 2017)

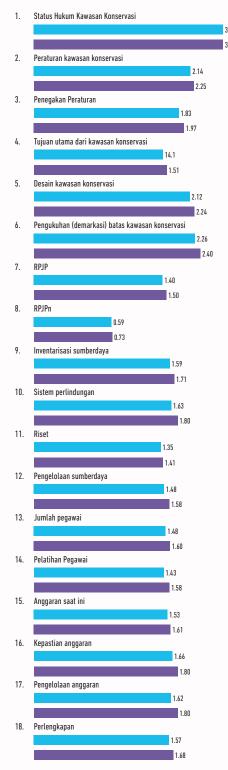


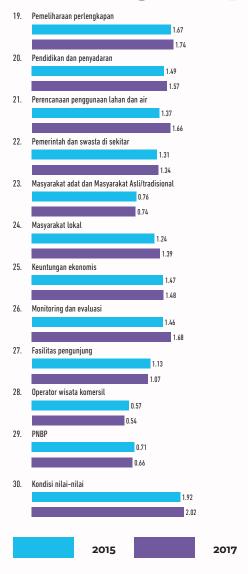
Berdasarkan Leverington et. al. 2010. Management Effectiveness Evaluation in Protected Area - a global study.





# **HASIL PENILAIAN TAHUN 2015 & 2017**





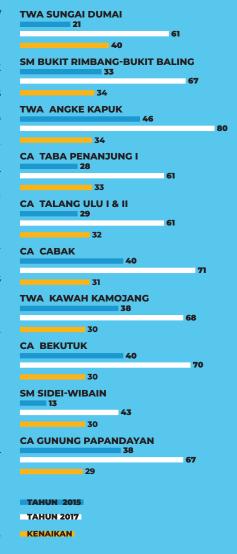
Grafik di atas menunjukkan perbandingan hasil penilaian di tahun 2015 dan 2017, dimana secara garis besar, nilai-nilai pada 30 indikator memiliki pola yang sama.



# KAWASAN KONSERVASI DENGAN PENINGKATAN SIGNIFIKAN

Berdasarkan SK Dirjen nomor 357/
KSDAE-SET/2015 telah dihasilkan
beberapa rekomendasi tindak
lanjut untuk peningkatan efektivitas
pengelolaan kawasan untuk setiap
elemen pengelolaan, termasuk langkahlangkah yang harus ditempuh. Dari 274
kawasan konservasi yang dinilai pada
tahun 2015 dan 2017, sebanyak 50 KK nilai
METT meningkat lebih dari 20 poin.

Peningkatan nilai METT tak lepas
dari upaya perbaikan yang dilakukan
baik pada level UPT maupun pusat.
Pada setiap akhir proses penilaian di
UPT, rumusan isu prioritas wajib ada
untuk menentukan perencanaan
pengelolaan pasca penilaian. Meskipun
pada kenyataannya tidak semua UPT
menjadikan isu prioritas pengelolaan
yang dihasilkan sebagai acuan
penyusunan rencana pengelolaan.







# **TEMUAN KUNCI**



- Ancaman dan tekanan dominan terhadap kawasan konservasi: perburuan, penebangan, perambahan, rekreasi dan wisata, pembuangan sampah dan limbah padat.
  - Ancaman dominan kawasan konservasi daratan: perambahan (2015), perburuan (2017).
  - Ancaman kawasan konservasi perairan laut: penggunaan alat tangkap yang tidak ramah, pemanfaatan biota laut yang dilindungi, dan aktivitas pembangunan dan sampah.



Elemen perencanaan merupakan aspek pengelolaan yang memiliki angka peningkatan tertinggi sebesar 11,6 %.



Rata-rata nilai 30 indikator METT meningkat 0,28 poin dari poin 1,38 di tahun 2015 menjadi 1,66 di 2017. Indikator masyarakat adat dan indikator iuran/PNBP menurun.



Dari penilaian tahun 2017 di 274 kawasan konservasi, 32,85 % kawasan termasuk kategori pengelolaan efektif (nilai METT>67 %). 64,23 % kategori kurang efektif dan 2,92% kawasan tidak efektif (<33%).



Taman Nasional memiliki nilai ratarata METT tertinggi (71,59 %). Kawasan konservasi lainnya memiliki nilai ratarata 53,25 %.



Kawasan konservasi di bawah pengelolaan Balai atau Balai Besar KSDA dan UPT Daerah menghadapi tantangan pengelolaan yang lebih besar dari TN.



Rata-rata nilai METT kawasan konservasi tahun 2017 (60,49%) meningkat sebesar 11,03% dari tahun 2015 (49,46%).



- Empat indikator terendah adalah:
- RPJPn: penjabaran teknis operasional RPJP yang memuat rencana kegiatan dan pembiayaan dari anggaran pemerintah (APBN/APBD) dan sumber lain yang tidak mengikat.
- Masyarakat adat: Pelibatan masyarakat lebih banyak pada konsultasi publik penyusunan blok/ zona dan RPJP. Beberapa UPT telah membentuk forum komunikasi dan pertemuan intensif di tingkat resor.
- Operator wisata: bersama pengelola menyampaikan nilainilai kawasan konservasi kepada pengunjung. Pada 2017, 139 kawasan konservasi belum memiliki kerjasama antara dengan operator wisata. Hubungan antara UPT dan operator masih terbatas pada aspekadministrasi.
- luran/pungutan: masuk dalam skema keuangan negara dan tidak dapat berkontribusi langsung kepada kawasan.



Hanya 171 kawasan konservasi (dari 274) yang dinilai memiliki RPJP. Angka tersebut meningkat dari penilaian 2015 (138 kawasan).



Alokasi anggaran pengelolaan kawasan berkisar dari Rp. 0-Rp. 30 M. Pada 2015, 156 unit kawasan konservasi yang tidak memiliki anggaran, sedangkan di 2017 sebanyak 9 unit kawasan konservasi yang tidak memiliki anggaran.



Jumlah personil di kawasan non-TN berkisar antara 0-188 orang, sedangkan di taman nasional sebanyak 30-287 orang. Masih ada kawasan konservasi yang tidak memiliki personil pengelola dan kawasan tidak pernah dikunjungi.



Tahun 2017, sebanyak 113 dari 274 kawasan konservasi daratan sudah memiliki desain, ukuran, bentuk, lokasi dan konektivitas yang ideal. sebanyak 161 kawasan lainnya belum ideal dan perlu mengembangkan pola pengelola berbasis bentang alam bersama para pihak.



# **DIMENSI PENGELOLAAN**



"Balai Taman Nasional Berbak melaksanakan Workshop dengan melibatkan para pihak untuk menentukan Nilai Penting Kawasan dan isu strategis dalam rangka penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang. Rencana Pengelolaan merupakan kebutuhan mendasar untuk mencapai tujuan pengelolaan yang ditetapkan. Melalui Rencana pengelolaan, UPT dan para pihak memiliki panduan dalam mengalokasikan sumber daya dan pencapaian target dalam periode waktu tertentu"

Analisis enam elemen penilaian METT berdasarkan empat dimensi pengelolaan Geldman et., al. (2018) memberikan gambaran umum kondisi pengelolaan kawasan konservasi sebagai berikut:



# DIMENSI **PENGELOLAAN**

Desain dan Perencanaan

Terkait dengan status hukum kawasan konservasi dan tenurial, kecocokan desain terhadap tujuan pengelolaan, • RPJPn (8) dan perencanaan yang jelas.

# INDIKATOR METT

- Status hukum (1)
- Tujuan pengelolaan (4)
- Desain kawasan konservasi (5)
- Pengukuhan batas kawasan (6)
- RPJP (7)
- Perencanaan Penggunaan lahan dan air(21)

# **ISU PENTING**

- Kawasan konservasi memiliki kekuatan hukum yang beragam; ada kawasan konservasi yang masih dalam tahap penunjukan, SK Gubernur, bahkan masih menggunakan Besluit Gubernur Hindia Belanda. Masih ada permasalahan batas di lapangan dan berkonflik dengan pihak ketiga.
- Perencanaan merupakan aspek mendasar yang harus dimiliki unit pengelola. Masih terdapat kawasan konservasi yang dikelola tanpa tujuan atau target yang jelas dan terukur.
- Perlu penyamaan data spasial batas kawasan sehingga tidak terjadi perbedaan data baik dari peta yang dikeluarkan BPKH dan instansi lain yang terkait serta dapat meminimalisir tumpang tindih kepentingan dan konflik tenurial. Diperlukan sinergi pengelolaan dengan dokumen perencanaan pengelolaan lain seperti RTRW, Kawasan Straegis Nasional atau lainnya yang juga bersinggungan dengan potensi kawasan seperti DAS, energi, pertambangan dan sebaran satwa kunci.
- Pola-pola kerjasama pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam belum memperhitungkan dampak positif dan negatif yang akan muncul dalam jangka pendek dan panjang.
- Batas kawasan belum diketahui oleh parapihak yang berada di sekitar kawasan
- Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan tanda batas perlu dukungan anggaran yang cukup termasuk untuk kegiatan sosialisasi kepada masyarakat ataupun para pihak disekitar kawasan.
- Beberapa kawasan konservasi belum menyusun RPJPn yang merupakan penjabaran RPJP yang bersifat teknis operasional, kualitatif dan kuantitatif.
- Dalam skema pengelolaan berbasis bentang alam (lanskap), perlu kerjasama dengan pengelola wilayah di sekitarnya.



# DIMENSI **PENGELOLAAN**

Kapasitas dan Sumberdaya

Terkait dengan jumlahpegawai, ketersediaan anggaran, dan bagaimana sumberdaya yang ada dikelola.

# **INDIKATOR METT**

- Jumlah pegawai (12)
- Staf terlatih (14)
- Jumlah anggaran (15)
- Kepastian anggaran (16)
- Pengelolaan anggaran
- Perlengkapan (18)
- Pemeliharaan perlengkapan (19)
- luran (29)
- Fasilitas pengunjung

# **ISU PENTING**

- Distribusi sumber daya manusia tidak merata atau sesuai kebutuhan pengelolaan tiap kawasan (secara kualitas dan kuantitas).
- Organisasi pengelolaan perlu memperhatikan standarisasi kompetensi terutama bagi pimpinan sesuai dengan tipologi kawasan yang akan dikelola.
- Perencanaan anggaran pada UPT BKSDA seringkali tidak berbasis kawasan dan tidak mengutamakan program-program prioritas.
- Pengadaan sarana dan prasarana tidak berdasarkan analisa kebutuhan pengelolaan (tidak tepat sasaran). Pengelola tidak memiliki prosedur standar untuk operasionalisasi dan pemeliharan sarana prasarana yang dimiliki (barang bergerak maupun barang tidak bergerak).
- Tingkat kepuasan (keanyamanan dan keamanan) pengunjung belum menjadi isu penting dalam pengelolaan kawasan.
- "Pungutan" tidak memberikan insentif secara langsung bagi pengelola kawasan karena masuk dalam mekanisme keuangan negara.



Petugas Balai KSDA Kalimantan Tengah (1) dan petugas Balai Taman Nasional Tambora (2) sedang melakukan patroli di dalam kawasan. Ketersediaan sarana dan prasarana pada tingkat tapak diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pengelolaan. Alokasi sumber daya direncanakan dan diimplementasikan secara efektif dan efisien





# **DIMENSI PENGELOLAAN**

# **INDIKATOR METT**

## **ISU PENTING**

Monitoring dan penegakan peraturan

Terkait dengan kecocokan kerangka kerja hukum, kapasitas untuk menegakan peraturan, dan memahami biologi, prosedur, dan kondisi kawasan konservasi.

- Peraturan kawasan konservasi (2)
- Penegakan peraturan (3)
- Inventarisasi (9)
- Sistem perlindungan (10)
- Penelitian (11)
- Pengelolaan Sumber daya
- Monitoring dan evaluasi
- Kondisi nilai-nilai (30)

- Penataan blok dan zonasi adalah dasar pengelolaan kawasan sehingga harus tepat dalam penetapannya dan intervensi pengelolaan yang dilakukan.
- Instrumen penegakan hukum sudah ada namun terkendala dalam kapasitas staff dan anggaran dalam implementasinya.
- Banyak kawasan tidak mengetahui rona/kondisi awal kawasan atau tujuan pengelolaan sehingga sulit menentukan arah pengelolaan dan akhirnya tidak dapat mempertahankan atau meningkatkan kondisi nilai-nilai kawasan.
- Pengelolaan kawasan saat ini belum seluruhnya berbasis keilmuan. Data dan informasi tidak tersedia secara lengkap (komprehensif) dan sistematis (road map penelitian tidak ada).
- Kegiatan monev masih parsial dengan keterbatasan data dan informasi serta hanya untuk memenuhi kebutuhan/program tertentu. Monev harus menjadi bagian dari program pengelolaan itu sendiri sehingga menghasilkan manajemen adaptif (adaptive management)
- PP.45/2004 jo. PP.65/2009 adalah dasar perlindungan hutan yang memberikan guideline umum sehingga perlu diterjemahkan dalam SOP per jenis kegiatan perlindungan hutan (patroli, kebakaran hutan, bencana dll).
- Kehadiran petugas dilapangan masih sering dilatari dalam skema kegiatan reaktif (represif), sedangkan kegiatan pre-emtif dan preventif belum optimal juga dengan skema pelibatan masyarakat dan stakholder disekitar kawasan. Penegakan hukum dengan skema non-litigasi.
- Pengelolaan data dan informasi tidak tersedia pengambilan keputusan.







# DIMENSI PENGELOLAAN

Pengambilan Keputusan Bersama (Kolaborasi) Terkait dengan

mekanisme mekanisme melibatkan para pihak di dalam dan sekitar kawasan konservasi, termasuk pengaruh dalam pengambilan kepeutusan pengelolaan.

# **INDIKATOR METT**

- Pendidikan dan Penyadartahuan (20)
- Masyarakat adat (23)
- Masyarakat lokal (24)
- Operator wisata komersil (28)
- Pemerintah dan swasta di sekitar kawasan (22)

## **ISU PENTING**

- Kegiatan Pengelolaan kawasan masih berfokus di dalam kawasan. Penguatan pengetahuan dan pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan disekitar kawasan baru dilakukan disebagian kawasan seperti hanya dalam kegiatan konsultasi publik (hanya memberikan saran, namun tidak ikut memutuskan suatu kebijakan).
- Pola pengelolaan yang hanya berfokus pada kawasan kelola (one-site minded) harusnya berubah menjadi pengelolaan kawasan berbasis lanskap.
- Menempatkan masyarakat sebagai subyek pengelolaan kawasan.
- masih banyak operator wisata hanya berperan sebagai guide wisata saja namun belum berperan aktif memebrikan pengetahuan-pengetahuan konservasi pada pengunjung.



"Masyarakat yang tergabung dalam Asosiasi Periau Danau Sentarum (APDS) yang telah melakukan kerja sama dengan Balai Besar Betung Kerihun dan Danau Sentarum untuk memanfaatkan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) berupa madu hutan. Pelibatan masyarakat secara nyata untuk memperoleh keuntungan ekonomi dapat meningkatkan dukungan langsung terhadap kawasan konservasi"

# PENUTUP

DIREKTORAF KAWASAN KONSERVASI DITJEN KSDAE

- Evaluasi merupakan bagian dan kebutuhan dari siklus pengelolaan yang tidak terpisahkan dari aspek yang lain. Management Effectiveness Tracking Tool (METT) adalah salah satu alat yang dapat digunakan sebagai panduan proses evaluasi pengelolaan kawasan konservasi.
- Melalui hasil evaluasi, pengelola dapat mengoptimalkan sumberdaya yang tersedia secara efktif dan efisien untuk mengatasi permasalah prioritas.
- METT membutuhkan alat verifikasi sebagai bukti pencapaian setiap indikator. Dengan demikian, melalui METT pengelola dapat meningkatkan kualitas pendokumentasian dan pengelolaan data dan informasi yang dimilikinya.
  - Dasar pengelolaan kawasan koservasi yang efektif didasarkan pada ketersediaan perencanan yang akurat, objektif, dan adaptif.
  - Pengelolaan kawasan konservasi secara efektif tidak hanya meliputi aspek internal tetapi juga eksternal, pengelola perlu bekerjasama dengan para pihak untuk mendapatkan dukungan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.
- Meningkatkan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi membutuhkan pemahaman terhadap potensi dan permasalahan yang ada di dalam dan sekitar kawasan.



# **REKOMENDASI TINDAK LANJUT**

- Scientific based management perlu diterapkan sehingga keputusan pengelolaan diambil dari ilmu pengetahuan yang kuat. Oleh karena itu, data dan informasi harus didokumentasikan dan dikelola dengan
- Pengelola kawasan harus mempertimbangkan nilai penting atau fitur utama, sejarah kawasan dan kondisi sosial ekonomi untuk memastikan kegiatan pengelolaan dilakukan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
- Memperkuat sistem perlindungan dengan melibatkan masyarakat lokal secara aktif (community patrol) di daerah penyangga kawasan.
- Pengelola meningkatkan intensitas interaksi dengan masyarakat sekitar kawasan, mitra kerja, institusi

- pendidikan dan penelitian, pemerintah daerah. interaksi tersebut digunakan untuk menyampailkan programprogram dan mengintegrasikannya dengan para pihak.
- Meningkatkan kepemimpinan, kekompakan, sistem kerja tim yang mendukung terciptanya suasana kerja yang nyaman, efektif, dan efisien.
- Meningkatkan peran masyarakat secara nyata dalam proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan evaluasi. Bentuk pelibatan masyarakat dapat berupa pengambilan keputusan penenttuan zonasi/ blok, penyelesaian konflik sumber daya di dalam kawasan.
- Meningkatkan pemanfaatan sumber daya sesuai dengan mekanisme yang berlaku.



# **CONTOH KEGIATAN YANG BERDAMPAK** NTING PADA PENILAIAN METT





## **KERJASAMA DENGAN PEMERINTAH DAERAH**

Taman Nasional Danau Sentarum telah sukses menyelenggarakan Festival Danau Sentarum yang bertujuan untuk mempromosikan kegiatan wisata alam. Festival serupa juga di gelar di TN Way Kambas, dimana kegiatan tersebut menunjukkan hubungan yang erat antara parapihak dengan UPT. Dalam kerangka penilaian METT, indikator 21. Pemerintah dan Swasta di Sekitar dapat meningkat.



### **KEMITRAAN KONSERVASI**

Kemitraan dengan masyarakat terus diperkuat sejalan dengan Peraturan Direktur Jenderal KSDAE No. P.6/ KSDAE/SET/KUM.1/6/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi pada KSA dan KPA yang bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Kawasan konservasi. Sampai tahun 2017 telah terdapat 42 Perjanjian Kerjasama dengan masyarakat untuk pemanfaatan zona tradisional. Kemitraan konservasi tersebut dapat membangun sinergitas antara aktivitas masyarakat lokal dan upaya memperkuat tata kelola lingkungan daerah penyangga. Dengan hal tersebut diharapkan dapat memperkuat sistem perlindungan dan pemanfaatan potensi kawasan konservasi. Dalam kerangka penilaian METT, indikator 24. Masyarakat Lokal dapat meningkat.



### **RENCANA TAHUNAN**

Rencana tahunan berupa Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJPn) yang memadukan perencanaan keuangan yang dibiayai APBN (Rencana Kerja / Renia) dengan rencana-rencana lainnya. RPJPn yang merupakan turunan dari Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) 10 tahun menguraikan secara lebih detail perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun, baik yang dibiayai APBN maupun sumber dana lain yang tidak mengikat. Beberapa UPT seperti Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan melakukan penyusunan rencana tahunannya (RPJPn) dengan melibatkan parapihak, sehingga perencanaan dan distribusi sumberdaya terutama anggaran dapat optimal dan menjadi komitmen bersama dalam implementasinya. Dalam kerangka penilaian METT, indikator 8. RPJPn dapat meningkat.



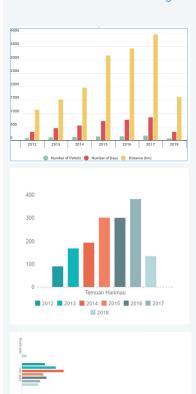
### **SISTEM PERLINDUNGAN**

Pengunaan Spatial Monitoring and Reporting Tool (SMART) dalam rangka Pengelolaan Berbasis Resort di beberapa kawasan konservasi dapat meningkatkan sistem perlindungan kawasan, meningkatkan akuntabilitas dan reliabilitas data, serta mempermudah pengelolaan data. Dampaknya antara lain:

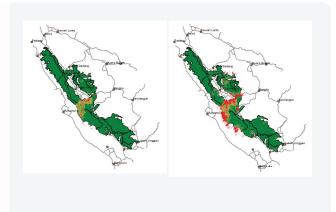
- ► Permasalahan di lapangan dapat direspon secara cepat dengan adanya informasi yang dapat diakses setiap level manajemen.
- ► Keterlibatan parapihak dalam pengelolaan kawasan (perlindungan Kawasan/patroli).
- Kegiatan pengelola kawasan dapat ditampilkan secara cepat, terstruktur, jelas, akurat dan reliable.

Dalam kerangka penilaian METT, indikator 10. Sistem Perlindungan dan indikator 12. Pengelolaan Sumberdaya dapat meningkat.

Upaya patroli untuk meningkatkan perjumpaan indikator harimau dan menurunkan tingkat ancaman di TNKS









### **PENGELOLAAN WISATA**

Kawasan konservasi diharapkan dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat lokal di sekitar kawasan. Keuntungan ekonomi tersebut termasuk pekerjaan tidak langsung, pembayaran jasa lingkungan, peningkatan penjualan usaha wisata, termasuk jasa pemandu wisata. Contoh keterlibatan masyarakat di TN Ciremai adalah pengelolaan wisata alam (design zona pemanfaatan) oleh masyarakat. Saat ini terdapat lebih dari 60 lokasi ekowisata di TN Gunung Ciremai yang dikelola dan dibangun oleh masyarakat. Dengan demikian masyarakat dapat memperoleh manfaat dan terlibat dalam menjaga dan melestarikan TN Gunung Ciremai. Dalam kerangka penilaian METT, indikator 24. Masyarakat Lokal dan indikator 25. Keuntungan Ekonomis dapat meningkat.

### **PENGELOLAAN KORIDOR**

Di Kapuas Hulu, penetapan Kawasan Ekosisten Esensial (KEE) sebagai Koridor Orangutan di DAS Labian-Leboyan bertujuan untuk menghubungkan kembali hutan-hutan yang terfragmentasi antara TN Danau Sentarum dan TN Betung Kerihun sepanjang 70 Km (Betung Kerihun-Lanskap Batang Ai-Lanjak Entimau, Danau Sentarum-hilir koridor). Kawasan yang merupakan jalur migrasi Orangutan tersebut memiliki fungsi hidrologis yang tinggi dan menjadi identitas sosial budaya dan ekonomi masyarakat. Melalui penetapan KEE Koridor Orangutan di Kapuas Hulu, para pemangku kepentingan dapat membangun komunikasi dengan baik dan mengelola KEE secara kolaboratif. Pembangunan sosial ekonomi, infrastruktur, dan kepentingan umum lainnya dapat dilakukan dalam rencana aksi pengelolaan KEE. Dalam kerangka penilaian METT, indikator 21. Perencanaan Penggunaan Lahan dan Air dan 22. Pemerintah dan Swasta di Sekitar dapat meningkat.























### **PELIBATAN MASYARAKAT**

Pelibatan masyarakat secara aktif dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi dilakukan oleh Balai TN Manupeu Tanadaru dan Laiwangi Wanggameti (MaTaLaWa) dengan meluncurkan aplikasi bernama MaMe (Masyarakat Melapor). Aplikasi ini berfungsi sebagai sarana komunikasi antara masyarakat dengan pihak pengelola kawasan TN MaTaLaWa untuk menyampaikan informasi terkait pengelolaan kawasan. Contohnya adalah jika ditemukan kejadian kebakaran hutan, illegal logging ataupun perambahan, masyarakat dapat langsung menginformasikan melalui fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi MaMe. Selain informasi gangguan terhadap kawasan TN MaTaLaWa, pengguna aplikasi MaMe juga dapat memanfaatkan untuk memperoleh informasi terkait prosedur pengajuan SIMAKSI (Surat Ijin Masuk Kawasan Konservasi, Ijin Penelitian dan Kunjungan Wisata, informasi terkait objek dan daya tarik wisata alam, akses menuju lokasi wisata, serta informasi lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Aplikasi berbasis Android ini dapat diunduh di Google Play Store. Dalam kerangka penilaian METT, indikator 10. Sistem Perlindungan, indikator 12. Pengelolaan Sumberdaya, dan 24. Masyarakat Lokal dapat meningkat.





## PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DI KAWASAN KONSERVASI

Pemanfaatan taman nasional tidak hanya jasa lingkungan wisata dan air. Melalui penetapan zona tradisional, masyarakat dapat memanfaatkan hasil hutan bukan kayu. Contoh tersebut dapat dilihat di Resort Balai Kencana, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Pada wilayah resort tersebut dialokasikan 1.845 hektar zona tradisonal dengan potensi utama damar mata kucing (Shorea javanica). Tegakan damar yang berada di dalam kawasan tersebut telah ditanam secara intensif pada Tahun 1960an dan turun-temurun diwariskan serta dimanfaatkan oleh keluarga. Sampai dengan Oktober 2018 telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara Balai Besar TNBBS dengan tiga Kelompok Tani Hutan (KTH; Damar Indah Jaya, Damar Mandapalu dan Damar Paseban) dengan total luas 195,22 hektar. Melalui perjanjian kerjasama, kelompok tani merasa aman untuk memanfatkan damar dan berpartisipasi langsung menjaga taman nasional. Melalui kemitraan tersebut dapat berdampak pada meningkatnya indikator METT lainnya yaitu indikator 10. Sistem perlindungan, indikator 23. Masyarakat adat, indikator 24. Masyarakat lokal, dan indikator 25. Keuntungan ekonomis.





# DAFTAR PUSTAKA

- Courrau, J., Dudley, N., Hockings, M., Leverington, F. Stolton, S. (2006). Evaluating effectiveness: a framework for assessing management effectiveness of protected areas. IUCN WCPA, James Cook University-AU, Rainforest CRC-AU.
- Direktorat Kawasan Konservasi. (2017). Pedoman Fasilitator Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktorat Kawasan Konservasi.
- Direktorat Kawasan Konservasi. (2017). Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktorat Kawasan Konservasi.
- Geldmann, J., Coad, L., Barnes, M., Craigie, Lan D., Hockings, M., Knights, K., Leverington, F., Cuadros, Ivon C., Zamora, C., Woodley, S., & Burgess, Neil D. (2015). Changes in protected area management effectiveness overtime: A Global Analysis. Journal of Biological Conservation.
- Hocking, M., S. Stolton, F. leverington, N. Dudley, & J. Courrau. (2006). Evaluating Effectiveness: A Framework for Assessing Management Effectiveness of Protected Areas. (2<sup>nd</sup> Edition). IUCN, Switserland and Cambridge, UK.
- Knights, K., I. Cuadros, C. Zamora, L. Coad, F. leverington, B. O`connor, M. G. de Lima, N. Kingston, F. Danks, M. Hockings, I. Malagu, P. Scheren, E. Ngoye, P. J. Sthepenson, & N. D. Burgess. Parks. (2014). A Preliminary Assessment of Protected Area Management Within the WWF Coastal East Africa Priority Place, Eastern Africa. (20.2).
- Leverington, F., K. L. Costa, J. Courrau, H. Pavese, C. Nolte, M. Marr, L. Coad, N. Burgess, B. Bomhard, & M. Hockings. (2010). *Management Effectiveness* Evaluation in Protected Areas – a global study. (2<sup>nd</sup> Edition). The University of Queensland. Brisbane, Australia.
- Nolte, C., F. Leverington, A. Kettner, M. Marr, G. Nielson, B. Bomhard, S. Stolton, S. Stoll-Kleemann, & M. Hockings. (2010). Protected Area management Effectiveness Assessment in Europe. A review of application, methods and results. Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany.
- Stolton, S., M. Hockings, N. Dudley, K. MacKinnon, T. Whitten, & F. Leverington. (2007). Management Effectiveness Tracking Tool. Reporting Progress at Protected Area Sites: (2nd Edition). WWF International, Swiss.
- Stalton, S. & N. Dudley. (2006). METT handbook: A guide to using the Management Effectiveness Tracking Tool (METT). WWF-UK.
- Sulastriningsih, D., Komara, Wenda Y., Muslich, M., dan Wilianto, Erwin. (2016). Laporan Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia Tahun 2016. Direktorat Kawasan Konservasi-Ditjen KSDAE.
- Wiratno. (2018). Sepuluh Cara (Baru) Kelola Kawasan Konservasi diIndonesia: Membangun "Organisasi Pembelajar". Direktorat Kawasan Konservaasi.
- Worboys, G., L., M. Lockwood, A. Kothari, S. Feary, & I. Pulsford. (2015). Protected Area Governance and Management. ANU Press, Canberra.





